

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan perkembangan saat ini, dibutuhkan sumber daya manusia bagi usaha perkembangan di segala bidang salah satunya adalah bidang pemerintahan. Pemerintahan merupakan bentuk organisasi dan organisasi hanya berfungsi jika manusia yang menghimpun dirinya saling berinteraksi dalam mewujudkan volume dan beban kerjanya. Hal itu pula yang dirasakan oleh organisasi pemerintahan hanya dapat bergerak mewujudkan visinya apabila didukung sumber daya manusia atau pegawai yang profesional. Peranan pegawai melalui pegawai negeri sipil sangatlah penting bagi negara, karena sebagai salah satu unsur aparatur negara, abdi negara sekaligus abdi masyarakat untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan rangka tujuan nasional.

Organisasi merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan, oleh sebab itu harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok dapat berkembang, maka jumlah dan mutu PNS yang ada harus disesuaikan. Menurut Sedarmayanti, perkembangan tugas pokok dapat berakibat semakin besarnya jumlah PNS yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil dengan dukungan pegawai yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui melalui manajemen kepegawaian yang optimal.¹ Hal ini penting karena SDM atau pegawai pemerintah menjadi dengan pengelolaan yang tepat,

¹ Aling, Agustien Ahungsehiwu. 2018. Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sangihe. Dikases dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada 28 juli 2019

maka akan terlaksana manajemen pemerintahan yang tepat pula bagi tercapaian tujuan yang diinginkan.

Salah satu kebijakan yang harus dilakukan dalam menghadapi luasnya pekerjaan dan beban tugas administrasi negara di Indonesia adalah pengembangan mutu organisasi melalui komputerasi di dalam organisasi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan BKD Kota Mojokerto mendapatkan masalah kedisiplinan beberapa pegawainya, adanya beberapa ASN yang komplain tentang tunjangan gaji yang tidak didapat karena scan absen pada masing-masing instansi yang tidak masuk dalam database, sehingga dianggap tidak masuk pada hari itu, dan juga kendala input karena hanya ada satu oprator per instansi.² Maka dari itu diharapkan dengan adanya terobosan baru dari BKD dengan melaksana komputerasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah daerah sekaligus memperluas kebutuhan pengolahan data untuk pelayanan publik. Bermula dengan pengelolaan data yang bersifat manual pada setiap instansi pemerintah daerah sehingga berdampak kurang efektifnya kinerja atau kegiatan pada instansi tersebut. Pemanfaatan komputerasi dan teknologi informasi dalam berbagai aspek pengelolaan informasi dalam setiap instansi akan menghasilkan efisiensi yang ditunjukkan oleh kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan serta ketelitian dan kebenaran informasi (validitas) yang dihasilkan. Hal ini juga diberkaitan dengan penggunaan perangkat keras (*hardware*), program aplikasi pendukung (*software*), perangkat komunikasi (*gadget*) serta koneksi internet yang memadai sebagai sarana pengelolaan.

² Hasil Wawancara dengan Bapak Anang Selaku Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Kepegawaian Kota Mojokerto pada 13 Maret 2019

Kemajuan teknologi menjanjikan penggunaannya mendapatkan kemudahan, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan luas (*global*), transparansi, dan efisien. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*, salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang akrab disebut *electronic Government (e-Government)*. Penerapan *e-Government* yang dimaksudkan disini ialah pengelolaan data pegawai (ASN) yang diupayakan untuk kebutuhan informasi yang aktual serta akurat dalam pengambilan keputusan. Mengingat pentingnya pengelolaan data pegawai tersebut, maka peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian melalui implementasi sistem informasi mobile kepegawaian terintegritas merupakan salah satu prioritas dalam tahapan pengembangan *e-government*. Pengertian *e-government* sendiri menurut Indrijit merupakan suatu mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*), dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet, dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik.³

Peraturan perundang-undangan telah di rumuskan oleh pemerintah, khususnya mengenai pengelolaan data dengan komputer. Salah satunya dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian, perlu diselenggarakan dan dipelihara sistem informasi yang dikembangkan dan dioperasikan melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Hal

³ Indrijat, Eko . 2016. "*Konsep Dan Strategi Electronic Government*". Diakses dari https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government pada 30 januari 2019, pukul 00.05

ini menunjukkan bahwa pengelolaan SIMPEG dapat diselenggarakan berbasis *e-government*. Karena pada dasarnya, praktik *e-government* tidak hanya memuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan publik, melainkan *e-government* juga dapat dilaksanakan dalam bentuk model *Government to Employee* (G-to-E) yang mana bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai dalam suatu institusi pemerintahan.⁴

Di samping itu, secara umum pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis *e-government* bertujuan untuk penyediaan sarana akses yang fleksibel, pemeliharaan integritas data, proteksi data dari kerusakan, dan penggunaan yang tidak legal serta sebagai sarana penggunaan secara bersama.⁵ Pelaksanaan SIMPEG berbasis *e-government* sangatlah penting, karena pengembangan sistem informasi sebagai instrumen komunikasi data yang tepat dalam rangka aktualisasi otonomi daerah. Oleh sebab itu pengembangan informasi memerlukan aplikasi yang dapat menyesuaikan antara arus informasi dengan sistem pengelolaan data yang diterapkan. Kemampuan komputer dalam pengambilan keputusan terprogram tak diragukan lagi, karena itu pengelolaan data komputer merupakan perkakas penunjang yang andal. Selain itu dengan aplikasi yang tepat, dapat memudahkan pegawai dalam mendapatkan informasi kepegawaian, kegaran, atau tugas yang harus diselesaikan di bidang kepegawaian sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan.

⁴ Indrijat, Eko . 2016. “*Konsep Dan Strategi Electronic Government*”. Diakses dari https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government pada 30 januari 2019, pukul 00.05

⁵ Djawa, Maria Ketty. 2015. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) untuk Mendukung *E-Governemnt* Pada Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Jawa Timur. Diakses dari <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id> pada 27 Juli 2019

Sistem informasi manajemen kepegawaian sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada seluruh personalia yang ada karena pegawai merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam menggerakkan roda organisasi pemerintahan.⁶ Pengelolaan pegawai baik dalam lingkup yang besar maupun kecil, akan membawa perubahan yang baik dalam kinerja pemerintah secara keseluruhan. Secara spesifik tujuan dari pengembangan sistem informasi kepegawaian adalah untuk mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian menjadi lebih efektif dan efisien.

Provinsi Jawa Timur menerapkan sistem informasi kepegawaiannya diberi nama Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), lain halnya dengan Kota Mojokerto sendiri meskipun memiliki latar belakang, tujuan, manfaat yang sama dengan yang lain. Namun pemerintah Kota Mojokerto lebih memilih nama Sistem Informasi Mobile Kepegawaian Terintegritas atau yang disingkat dengan SIMOKER. Badan Kepegawaian Daerah Kota Mojokerto membuat SIMOKER berdasarkan peraturan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan tujuan diterapkannya untuk, a. Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; b. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik; c. Untuk kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh OPD di lingkup pemerintah Kota Mojokerto.⁷

⁶ Karman, Joni. 2017. Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Musi Waras. Jurnal SISFOKOM Vol 6 No 2 Hal 105

⁷ Peraturan Walikot Mojokerto Nomor 12 Tahun 2015 pasal 3

Dengan hal ini SIMOKER diharapkan menambah kecepatan dan ketepatan pelayanan dapat ditingkatkan, kebanyakan sistem pengelolaan komputer pada mulanya mengikuti rancangan pengelolaan manual dimana setiap penerapan diolah secara terpisah dengan memakai file terpisah pula. SIMOKER juga dianggap sebagai salah satu inovasi yang dilakukan oleh BKD Kota Mojokerto dalam mengatasi masalah kepegawaian di Kota Mojokerto, kendala yang dihadapi oleh BKD adalah sebelum penggunaan SIMOKER ada beberapa pegawai yang sering titip absen dengan temannya karena bisa diakses oleh semua pegawai, kualitas pengelolaan data juga kurang bagus.⁸ Namun diadakannya SIMOKER ini mewajibkan pegawai mengakses SIMOKER per-*devicenya* masing-masing, karena penggunaan *barcode* di *id* kepegawaianya. Kelebihan SIMOKER selain hanya bisa diakses oleh satu device per *id*, mereka juga bisa menginput data diri mereka sendiri seperti Surat Keputusan (SK) yang sudah ada dengan format file .pdf, hal ini sangat mempermudah ASN untuk mengecek SK yang mereka punya, dapat juga melihat absensi mereka, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kapan mereka pensiun.⁹ Beberapa aspek atau fitur dalam aplikasi SIMOKER ini berupaya untuk meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen kepegawaian di Kota Mojokerto.

Sebagai salah satu instansi dari pemerintah daerah Kota Mojokerto yang mengurus pengelolaan kepegawaian di daerah Kota Mojokerto, saat ini BKD telah

⁸ Berita Metro. 2017. BKD kota mojokerto raih penghargaan pelayanan kepegawaian. Diakses dari <http://www.beritametro.news/mojokerto/bkd-kota-mojokerto-raih-penghargaan-pelayanan-kepegawaian> pada 25 Juli 2019

⁹ Prabowo, Irfandi dan Eva Hany Fanida. 2018. Inovasi Pelayanan Kepegawaian Melalui Aplikasi Sistem Informasi *Mobile* Kepegawaian Terintegrasi (SIMOKER) Berbasis Android di Badan Kepegawaian Kota Mojokerto. Diakses dari jurnalmahasiswa.unesa.ac.id pada 26 Juli 2019

menerapkan pengelolaan kepegawaian dengan penerapan komputersasi dan teknologi informasi manajemen kepegawaian dan mulai mengimplementasikan sistem manajemen kepegawaian, demi meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian di BKD Kota Mojokerto ini merupakan implementasi e-Government dalam pelayanan bidang kepegawaian secara transparan dan objektif. Sistem ini diciptakan guna menyelesaikan masalah Validitas data pegawai yang rendah, karena setiap OPD hanya satu orang yang mengurus sehingga membuat kewalahan. Data ASN tidak up to date, masalah status pegawai yang kurang terurus, malasnya para pegawai untuk menginput manual data ke sistem yang sudah ada dulu, tidak terurusnya berkas para pegawai yang kemungkinan dapat hilang, dll. Dengan diterapkannya SIMOKER diharapkan semua permasalahan terkait kepegawaian di BKD Kota Mojokerto tersebut dapat diatasi dan juga diharapkan bisa menunjang produktivitas serta efisiensi pegawai dalam pekerjaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerepan E-Government yang telah dilakukan oleh BKD Kota Mojokerto?
2. Apa Faktor penghambat dalam penerapan E-Government di BKD Kota Mojokerto?

C. Tujuan

Dari dua rumusan masalah dan latar belakang diatas, memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, ialah:

1. Mengetahui bagaimana penerapan E-Government yang diterapkan oleh BKD Kota Mojokerto
2. Mengetahui faktor penghambat dalam penerapan E-Government di BKD Kota Mojokerto

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting karena menghasilkan uraian yang akurat dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis dan secara praktis penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan teknologi di daerah pemerintahan Kota Mojokerto, terlebih BKD dalam sistem kepegawaiannya.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap pemerintah Kota Mojokerto terkait inovasi berbasis *Android* yang akan diterapkan dilingkungan pemerintahan Kota Mojokerto sendiri, untuk mencapai target *Smart Service*.

E. Definisi Konsep

1. E-Government

Pengertian *e-government* menurut Richardus Eko Indriji merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder), dimana melibatkan penggunaan

teknologi informasi (terutama internet, dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik.¹⁰ Disisilain UNDP (*United Nation Development Progame*) mengartikan e-government secara lebih sederhana, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT-*Information and Communication Technology*) oleh pihak pemerintah.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, *e-government* adalah suatu perkembangan teknologi yang dapat diakses dengan mudah dan bisa mempermudah suatu urusan. Hal ini juga didukung dengan perkembangan teknologi yang dilakukan oleh BKD Kota Mojokerto dalam aplikasi SIMOKER.

2. Manajemen Kepegawaian

Manajemen kepegawaian sering juga disebut dengan istilah manajemen personalia. Manajemen kepegawaian dibutuhkan dalam rangka mengupayakan efektifitas kinerja sumber daya manusia dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. menurut Musanef, manajemen kepegawaian adalah ilmu dalam ranhka perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan tenaga kerja untuk tercapainya tujuan yang ditentukan terlebih dahulu dengan adanya kepuasan pada sisi pegawai.¹¹ Manejemen kepegawaian memiliki tujuan dalam dua aspek yakni mewujudkan kinerja yang efektif dan sumberdaya manusia yang kompeten.

3. SIMOKER

Sistem Informasi *Mobile* Kepegawaian Terintegritas (SIMOKER) adalah suatu inovasi atau perkembangan layanan kepegawaian yang dilakukan oleh BKD Kota Mojokerto guna mempermudah akses Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap segala

¹⁰ Indrijat, Eko . 2016. "*Konsep Dan Strategi Electronic Government*". Diakses dari https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government pada 30 januari 2019, pukul 00.05

¹¹ Musanef. 2002. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung. Hal 11

kebutuhan ASN itu sendiri, karena semua data tentang ASN tersebut sudah masuk dan dapat dipantau melalui *Smartphone*. Dengan hal ini memudahkan pegawai BKD dalam pengelolaan data dan juga membuat para pegawai mandiri dalam melihat status-status kepegawaiannya.

F. Definisi Operasional

Menurut Walizer dan Wienir definisi operasional adalah merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati (observasi) serta bagaimana mengukur suatu variable ataupun konsep definisi operasional tersebut, serta bisa membantu kita untuk mengklasifikasi gejala disekitar dalam kategori khusus dari suatu variable. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi variable-variable dari konsep tersebut sehingga bisa mempermudah analisis dari penelitian, dan bisa mengurangi kesalahan dalam pengamatan pada saat penelitian. Adapun variable-variable yang akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah :

1. E-Government dalam penerepan sistem kepegawaian melalui Sistem Informasi Mobile Kepegawaian Terintegritas Kepegawaian (SIMOKER) di BKD Kota Mojokerto.
 - a. Kesiapan pelaksanaan *e-government* dalam SIMOKER Kota Mojokerto
 - b. Pelaksanaan SIMOKER Kota Mojokerto
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIMOKER Kota Mojokerto
2. Faktor penghambat dalam penerapan program Sistem Informasi Mobile Kepegawaian Terintegritas Kepegawaian (SIMOKER) di BKD Kota Mojokerto.
 - a. Keterbatasan server yang dimiliki oleh BKD
 - b. Kendala aplikasi lain yang terintegritas dengan SIMOKER

- c. Kurangnya fitur upload dan download pada aplikasi SIMOKER
- d. Beberapa ASN kurang memahami teknologi
- e. Belum lengkap dan mutakhirnya informasi serta manfaat yang minim bagi pegawai

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ditunjukkan oleh setiap ilmu pengetahuan sebagai alat untuk menjelaskan kebenaran maupun kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Metode penelitian merupakan pengetahuan berbagai metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data objektif dan untuk menganalisis data.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif. Sebagaimana yang dimaksud penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang lebih mengutamakan pada keaslian, tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu. Adapun karakteristik penelitian deskriptif kualitatif adalah menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utamanya, menggunakan metode pengamatan, wawancara, dokumentasi, menganalisis data secara induktif, menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus yang telah diambil, menggunakan kriteria sendiri untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara dan hasil penelitian dirundingkan serta disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data. Maka dari itu peneliti akan mendeskripsikan

atau menggambarkan tentang Implementasi Sistem Informasi Mobile Kepegawaian Terintegritas di BKD Kota Mojokerto.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat diperoleh. Yang menjadi sumber data penelitian dalam penelitian ini adalah informan, responden dan dokumen. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian¹². Responden adalah orang yang memberikan informasi dan merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian. Dokumen disini berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, jurnal, buletin, majalah ilmiah, laporan penelitian, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen yaitu setiap bahan tertulis atau film¹³.

Hal itu dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperdalam kajian teoritis dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh para peneliti lain. Selain itu sumber data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber peneliti dari sumber yang sudah ada, yaitu melalui referensi seperti buku, jurnal, media masa, peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu serta informasi pendukung lainnya yang bersangkutan dengan penelitian terkait.

¹² Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 90

¹³ Ibid., hal. 161.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang sangat penting dalam penelitian. Hal ini berguna untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan sebenarnya seperti yang diharapkan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.¹⁴ Observasi dilakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung di BKD Kota Mojokerto pada bidang yang bersangkutan untuk menangani atau bertanggung jawab atas program SIMOKER yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁵ Wawancara digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas. Wawancara ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan yang diinginkan agar dapat mendapatkan informasi yang lebih kongkrit. Melalui wawancara ini, peneliti berharap bisa

¹⁴ Riduan. 2004. Metode Riset. Jakarta : Rineka Cipta, Hal.104

¹⁵ Sugiyono, Motedologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: CV. Alfabeta, 2013, Hal. 231

memperoleh gambaran dan data-data mengenai Implementasi SIMOKER di BKD Kota Mojokerto.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbenyuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Stufi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁶ Dokumentasi ini perlu dilakukan demi mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, dan lain sebagainya. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara atau metode di mana peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap implementasi SIMOKER di BKD Kota Mojokerto.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk mendapatkan data primer, pada penelitian ini lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Mojokerto.

¹⁶ Sugiyono, Motedologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: CV. Alfabeta, 2013, Hal. 240

5. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.¹⁷ Subjek penelitian dalam penelitian ini yang bersangkutan dengan perumusan serta pembuatan atau yang bertanggungjawab tentang aplikasi SIMOKER, yaitu :

- 1) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
- 2) Staf di Bidang Data dan Informasi
- 3) Kepala Sub Bidang Kinerja dan Penghargaan

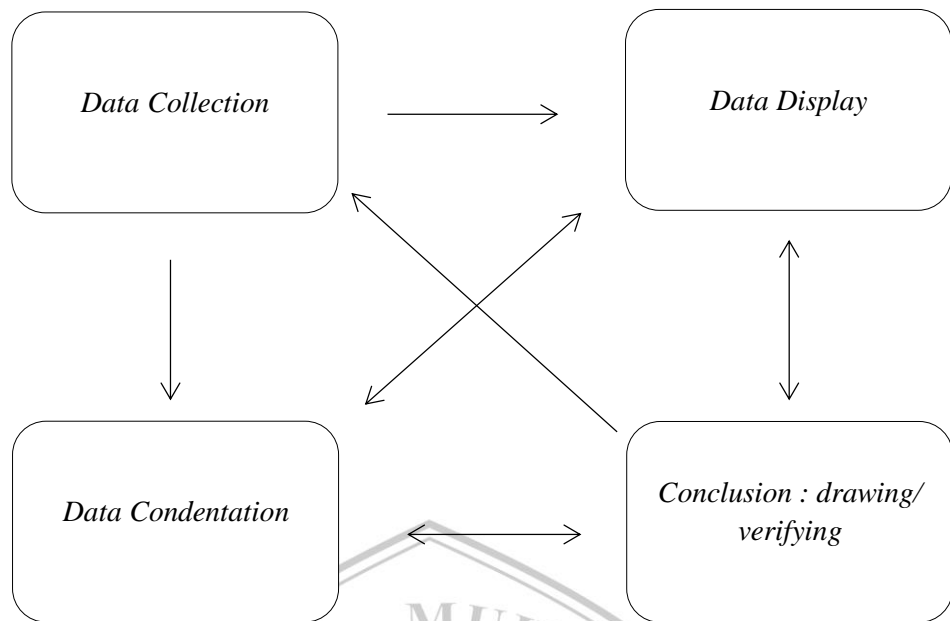
6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁸

Model analisis data yang akan digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah *Analysis Interactive* dari Miles dan Habermas. Model ini terdiri dari empat komponen yang saling berkaitan, seperti gambar berikut :

¹⁷ Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Penerbit Erlangga. Hal.91

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013, Hal. 244



Gambar 1.1 Analisis Data Model Interactive

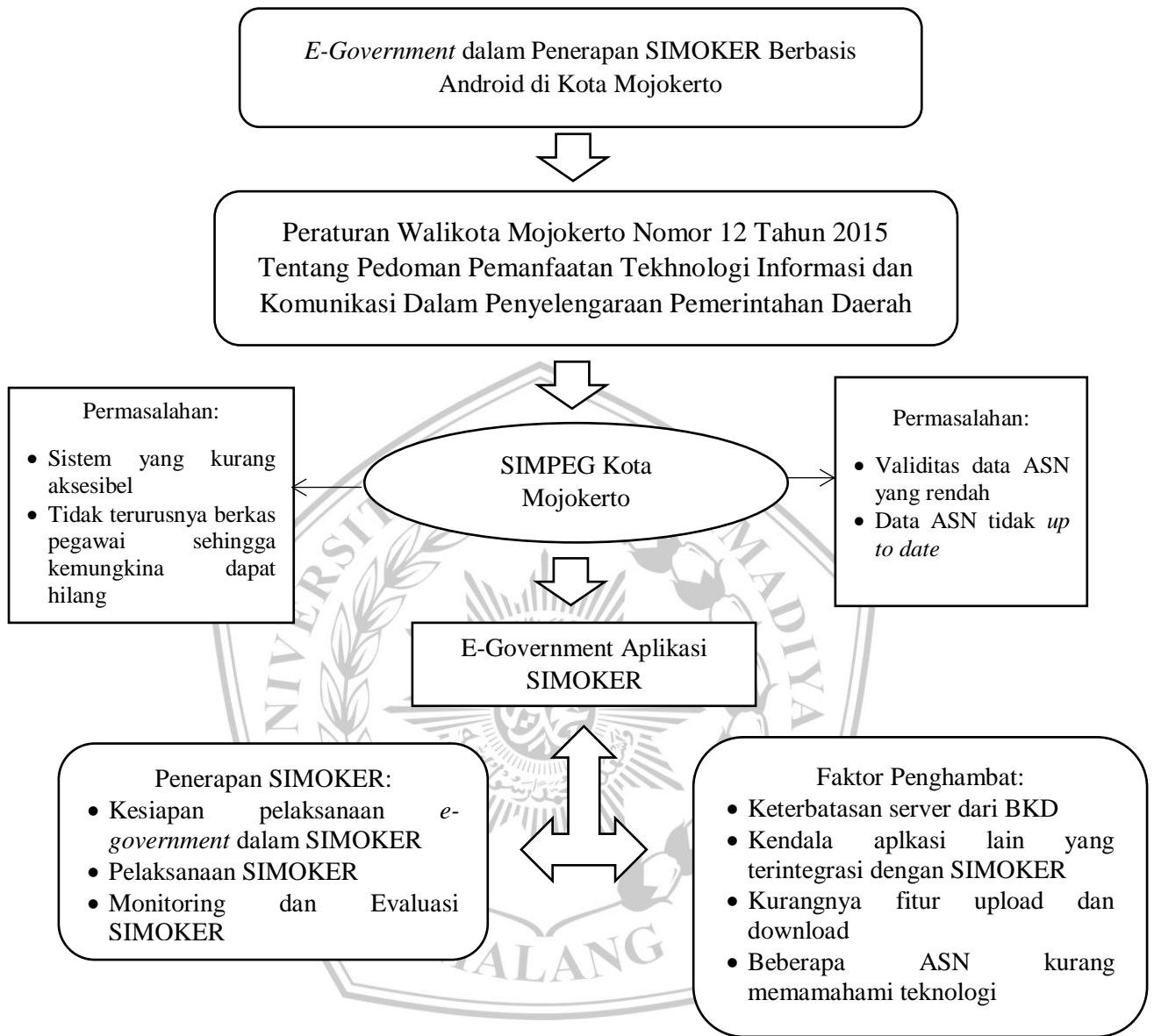
Komponen-komponen diatas dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Data Collection* yaitu kegiatan mengumpulkan dokumen sebagai sumber data yang diperlukan sebagai bahan masukan dalam menghasilkan informasi sesuai dengan yang dikehendaki. Data Collection dilakukan menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumen telah disusun sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan.
- b) *Data Condensation* yaitu merupakan proses penelitian, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan merubah data yang ditemukan dilapangan berdasarkan catatan lapangan, hasil interview, dokumen dan fakta dilapangan.
- c) *Data Display* yaitu data disajikan dalam bentuk sekumpulan informasi yang telah tersusun dan menandakan telah adanya proses penarikan kesimpulan.

d) *Conclusion Drawing/ Verification* yaitu sebuah gerakan pengulangan, penelusuran data kembali dengan cepat, sebagai akibat pikiran kedua yang timbul pada peneliti pada waktu menulis dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan. Kesimpulan ditarik setelah serangkaian proses diatas dilakukan, berdasarkan atas makna yang didapatkan dari data yang diperoleh.



7. Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir Penelitian Gambar
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019